

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011.
- Asnawi, M. Natsir., *Hermeneutika Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Irvan Mawardi, dan Muhamad Jufri, *Keadilan Pemilu Hak Banding Komisi Pemilihan Umum Dalam Sengketa Proses Pemilihan Umum*, Yogyakarta, Pustaka Ilmu, 2021
- Maria SW Sumardjono, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2019.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Noor Halim Perdana Kusuma, dan Muhammad Adiguna Bimaksakti, *Panduan Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dan Persidangan Elektronik (E-Litigasi)*, Jakarta, Prenamedia Group, 2020.
- Mustika, Cindyva Thalia., *Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Indonesia*, Cetakan Pertama, Bantul: Samudra Biru, 2024.
- Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, cetakan pertama, Karanganyar: Oase Pustaka, 2020.
- Sirajuddin, Didik Sukriono dan Winardi, *Hukum Pelayanan Publik*, Cetakan Pertama, Malang: Setara Press, 2011.
- Soekanto, Soerjono., dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Urip Santoso., *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, cetakan ketiga, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Supandi, *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi kedua, Cetakan kesatu, Bandung: PT. Alumni, 2016.

Suteki, Galang Taufani., *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2018.

Viswandro, *Kamus Istilah Hukum Sumber Rujukan Peristilahan Hukum*, Yogyakarta, Medpress Digital, 2014

Wiradipradja, E. Saefulla, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung: Keni Media, 2016.

Zainuddin ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4648.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3935.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peratuan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1132.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 06/G/KI/2013/PTUN-PDG, perihal sengketa informasi publik antara Pemohon Keberatan Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat dengan Termohon Keberatan Drs. H. Syafrial DT Garang, M.Pd.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 02/G/KI/2017/PTUN.PLK, perihal sengketa informasi publik antara Pemohon Keberatan Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya dengan Termohon Keberatan Hunda Y Mihing.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 5/G/KI/2018/PTUN.PLK, perihal sengketa informasi publik antara Pemohon Keberatan Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya dengan Termohon Keberatan Meyiwati.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar Nomor 1/G/KI/2019/PTUN.Mks. perihal sengketa informasi publik antara Pemohon Keberatan Kantor Pertanahan Kabupaten Mamasa dengan Termohon Keberatan Abasia.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 2/G/KIP/2019/PTU.BKL perihal sengketa informasi publik antara Pemohon Keberatan Kantor Pertanahan Kota Bengkulu dengan Termohon Keberatan Darma Yulia.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 2/G/KI/2019/PTUN.SBY perihal sengketa informasi publik antara Pemohon Keberatan Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dengan Termohon Keberatan Ghoniyah CS.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 9/G/KI/2020/PTUN.SMD perihal sengketa informasi publik antara Pemohon Keberatan Kepala Kantah Kabupaten Kutai dengan Termohon Keberatan Hj. Norhan.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 15/G/KI/2020/PTUN.BNA perihal sengketa informasi publik antara Pemohon Keberatan Kepala Kantah Kab. Aceh Tamiang dengan Termohon Keberatan YLBI-LBH Banda Aceh.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 2/G/KI/2021/PTUN.YK perihal sengketa informasi publik antara

Pemohon Keberatan Kepala Kantah Kota Yogyakarta dengan Termohon Keberatan Paulus Hartanto.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 15/G/KI/2021/PTUN.PLK perihal sengketa informasi publik antara Pemohon Keberatan Kepala Kantah Kabupaten Kapuas dengan Termohon Keberatan Kelompok Tani Simpei Karuhei.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 19/G/KI/2021/PTUN.PLK perihal sengketa informasi publik antara Pemohon Keberatan Kepala Kantah Kabupaten Kapuas dengan Termohon Keberatan Milawati.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 31/G/KI/2021/PTUN.SBY perihal sengketa informasi publik antara Pemohon Keberatan Kepala Kantah Kabupaten Nganjuk dengan Termohon Keberatan Oie Halim Wibisono.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 174/G/KI/2022/PTUN.SBY perihal sengketa informasi publik antara Pemohon Keberatan Kepala Kantah Kabupaten Banyuwangi dengan Termohon Keberatan Mulyadi.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 8/G/KI/2023/PTUN.SMG perihal sengketa informasi publik antara Pemohon Keberatan Kepala Kantah Kabupaten Klaten dengan Termohon Keberatan Tarna.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 23/G/KI/2023/PTUN.PLK perihal sengketa informasi publik antara Pemohon Keberatan Kepala Kantah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Termohon Keberatan Dedi Susanto.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 36/G/KI/2023/PTUN.SMG perihal sengketa informasi publik antara Pemohon Keberatan Kepala Kantah Kota Semarang dengan Termohon Keberatan Paguyuban Family Housing Blok G DR Wahidin Semarang.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 57/G/KI/2023/PTUN.SBY perihal sengketa informasi publik antara Pemohon Keberatan Kepala Kantah Kabupaten Gresik dengan Termohon Keberatan Kartika.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 7/G/KI/2024/PTUN/YK perihal sengketa informasi publik antara

Pemohon Keberatan Kepala Kantah Kabupaten Sleman dengan Termohon Keberatan Sumiyem DKK.

Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 188/V/KIP-PS-A/2012 perihal sengketa informasi publik antara Pemohon perihal sengketa informasi publik antara Pemohon Drs. H.Syafrial DT. Garang, M.Pd dengan termohon Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat (Kanwil BPN Sumbar)

Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah (KIP Kalteng) Nomor 024/X/KI/Kalteng-PSI-A-M-A/2016 perihal sengketa informasi publik antara Pemohon Hyunda Mihing dengan termohon informasi Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya (Kantah Kota Palangkaraya).

Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah (KIP Kalteng) Nomor 007/XI/KIKALTENG-PS/A-M-A/2017 perihal sengketa informasi publik antara Pemohon Meyiwati dengan termohon informasi Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya (Kantah Kota Palangkaraya).

Putusan Komisi Informasi Aceh (KI Aceh) Nomor 046/X/KIA-PS-A/2018 perihal sengketa informasi publik antara Pemohon Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh dengan termohon informasi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang (Kantah Kab. Aceh Tamiang)

Putusan Komisi Informasi Provinsi Bengkulu (KIP Bengkulu) Nomor 165/X/KIP-BKL.PSI/A/2018 perihal sengketa informasi publik antara Pemohon Darma Yulia dengan termohon informasi Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu (Kantah Kota Bengkulu).

Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat (KIP Sulsel) Nomor 01/VII/KI-SB/PS-A/2019 perihal sengketa informasi publik antara Pemohon Abasia dengan termohon informasi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamasa (Kantah Kab. Mamasa).

Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur (KIP Kaltim) Nomor 25/REG/PSI/KI-KALTIMVIII/2019 perihal sengketa informasi publik antara Pemohon HJ. Norhani dengan termohon informasi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kertanegara (Kantah Kab. Kertanegara)

Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur (KIP Jatim) Nomor 126/VII/KIPProv.Jatim-PS-A-M/2019 perihal sengketa informasi publik antara Pemohon Ghoniyah CS dengan termohon informasi Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I (Kantah Kota Surabaya I)

- Putusan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (KID DIY) Nomor 003/II/KIDDIY-PS-A-M/2020 perihal sengketa informasi publik antara Pemohon Paulus Hartanto dengan termohon informasi Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta (Kantah Yogyakarta)
- Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah (KIP Kalteng) Nomor 010/XII/KI-KALTENG-PS/2020 perihal sengketa informasi publik antara Pemohon kelompok Tani Simpei Karuhei dengan termohon informasi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas (Kantah Kab. Kapuas)
- Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah (KIP Kalteng) Nomor 015/XII/KI KALTENG-PS-A/2020 perihal sengketa informasi publik antara Pemohon Milawati, Megawati, dan M, Supianor, S.Pi dengan termohon informasi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas (Kantah Kab. Kapuas)
- Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur (KIP Jatim) Nomor 19/II/KI-Prov.Jatim-PS-A/2021 perihal sengketa informasi publik antara Pemohon Oei Halim Wibisono dengan termohon informasi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk (Kantah Kab. Nganjuk)
- Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur (KIP Jatim) Nomor 96-XKI-Prov. Jatim-PS-A-2022 perihal sengketa informasi publik antara Pemohon Mulyadi dengan termohon informasi/pemohon keberatan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi (Kantah Kab. Banyuwangi)
- Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur (KIP Jatim) Nomor 151/IV/KIProv.Jatim-PS-A/2023 perihal sengketa informasi publik antara Pemohon Kartika dengan termohon informasi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik (Kantah Kab.Gresik).
- Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (KIP Jateng) Nomor 005/PTS-A/V/2023 perihal sengketa informasi publik antara Pemohon Paguyuban Family Housing Blok G DR Wahidin Semarang dengan termohon informasi Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang (Kantah kota Semarang)
- Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah (KIP Kalteng) Nomor 001/III/KI-Kalteng-PS-A-2023 perihal sengketa informasi publik antara Pemohon Dedi Susanto dengan termohon informasi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kantah Kab. Kotawaringin Timur)
- Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (KIP Kalteng) Nomor 001/PTS-A/I/2023 perihal sengketa informasi publik antara Pemohon Tarna dengan

termohon informasi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten (Kantah Kab. Klaten)

Putusan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (KID DIY) Nomor 002/I/KIDDIY/PS/2024 perihal sengketa informasi publik antara Pemohon Sumiyem DKK dengan termohon informasi Kepala Kantor Pertanahn Kabupaten Sleman (Kantah Sleman)

Jurnal

Kholifah, Khusnul dan Yusron Marzuki, “Ratio Decidendi Putusan Nomor 99/PID.SUS/2022/PN.PNG Terhadap Perkara Tindak Pidana Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”, *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law dan Social-Political Governance*, Vol.3 No. 1 (Januari-April 2023), 1036, <https://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/283/311>.

Moch. Iqbal, “Aspek Hukum Class Action dan Citizen Law Suit Serta Perkembangannya di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1 No. 1 (2012),:91, doi.org/10.25216/jhp.1.1.2012.89-112

Islamiyati, “Kritik Filsafat Hukum Positivisme sebagai Upaya Mewujudkan Hukum yang berkeadilan”, *Law and Justice Journal*, Vol. 1, No. 1 (2018), November 2019: 82-96, <https://doi.org/10.14710/ldjr.v1i1.3574>

Internet

Insyafil, “Rasio Desidensi dari Seorang Hakim”, <https://pta-bandarlampung.go.id/artikel-makalah/977-ratio-desidendi-dari-seorang-hakim.html>, (diakses tanggal 28 November 2024, pukul 14.59 WIB).

Tirtayasa, Janathul Firdaus “Perwujudan Asas Keseimbangan Pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara”. <https://www.ptun-surabaya.go.id/wp-content/uploads/2024/10/Perwujudan-Asas-Keseimbangan-Pada-Hukum-Acara-Peradilan-Tata-Usaha-Negaraauto.pdf>, (diakses tanggal 20 Maret 2025, pukul 14.59 WIB).

Tesis

Kusumaningrum, Dewi Eliza “Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Rangka Memberikan Kepastian Hukum Bagi Pencari Keadilan” Tesis, Magister Hukum, Universitas Gadjah mada, 2015.

Kholifah, Ayu, “Analisis Status Badan Publik Bagi Perseroan Terbatas Dalam Sengketa Keterbukaan Informasi Publik (Studi Putusan Komisi Informasi Pusat No. 011/III/KIP-PS/2016) ” Tesis, Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2018.

Tongku Siregar “Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Melalui Jalur Mediasi oleh Mediator Komisi Informasi Publik Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta” Tesis, Magister Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2018.